

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemandirian Desa

1. Pengertian Kemandirian Desa

Desa secara universal adalah sebuah *aglomerasi* (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area pedesaan. Sementara untuk mandiri, pengertannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah.¹⁸

Menurut Hastowiyono, secara etimologis, kemandirian berbeda dengan kesendirian, berbeda pula dengan kedirian. Kesendirian berarti mengurus dirinya sendiri tanpa dukungan pemerintah, dan pemerintah membiarkan desa bekerja sendiri dengan kekuatan lokal, misalnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Kedirian sering disebut dengan *autarchi* atau sikap ego desa yang lebih banyak berorientasi ke dalam, yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas (kemampuan) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, tanpa menggantungkan dirinya kepada pihak lain.¹⁹

¹⁸ Fatmawati, Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.2, 2019, hal. 95.

¹⁹ Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015), hal. 6.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subyek. Subyek peran serta adalah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian peran serta masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dalam memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan serta berperan dalam menilai hasil pembangunan, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fungsionalisasi dari semua sumber yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang kondusif, yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Dalam hubungannya dengan partisipasi, Tjokroamidjojo mengemukakan bahwa: keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.²⁰

²⁰ Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1983), hal. 207.

Pastisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu: (1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; (4) Partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi.²¹ Sedangkan Sudriamunawar menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam praktiknya mengandung beberapa pengertian, yaitu:²²

- a. Keterlibatan dalam proses; penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan memetik hasil dan manfaat pembangunan secara adil dan merata.

2. Manfaat Desa Mandiri

Beberapa manfaat dari desa mandiri antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Berkembangnya potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
- 2) Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.
- 3) Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Menurunnya ketimpangan pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

²¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Fak. Sospol - UGM, 1997), hal. 117.

²² Sudria Munawar, *Kepemimpinan...*, hal. 49.

²³ *Ibid.*, hal.55.

3. Indeks Kemandirian Desa

Indeks Kemandirian Desa digunakan untuk mengukur hasil pembangunan suatu desa. Indeks Kemandirian Desa ini dibentuk dari 3 dimensi, yaitu:²⁴

- 1) Indeks Kemampuan Sendiri (input), yang mencakup:
 - a) Variabel Kebutuhan Dasar, meliputi fasilitas perumahan, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kelembagaan sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas keamanan.
 - b) Variabel Fasilitas Pemerintah Desa, meliputi fasilitas politik dan tata pemerintah.
 - c) Variabel Fasilitas Ekonomi, meliputi fasilitas daya saing ekonomi.
- 2) Indeks Tanggung Jawab Bersama (proses), yang mencakup:
 - a) Variabel Kegiatan kemasyarakatan, meliputi kegiatan perumahan, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kelembagaan sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas keamanan.
 - b) Variabel Kegiatan Pemerintah Desa, meliputi kegiatan politik dan tata pemerintah.
 - c) Variabel Kegiatan Ekonomi, meliputi kegiatan usaha ekonomi
- 3) Indeks Keberlanjutan (outcome), yang mencakup:

²⁴ *Ibid.*, hal. 7.

- a) Variabel Manfaat Kebutuhan Dasar, meliputi manfaat hasil kegiatan perumahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelembagaan sosial, pengelolaan lingkungan hidup dan keamanan.
- b) Variabel Manfaat Pemerintahan Desa, meliputi manfaat hasil kegiatan politik dan tata pemerintah.
- c) Variabel Manfaat Ekonomi, meliputi manfaat dan hasil kegiatan pengembangan ekonomi.

4. Tantangan Mewujudkan Desa Mandiri

Tantangan Mewujudkan Desa Mandiri Tantangan implementasi UU Desa dan mewujudkan Desa mandiri dapat dilihat dari optimisme dan kekhawatiran para pengamat terhadap pelaksanaan UU Desa sepanjang tahun 2015 – tahun pertama implementasi UU No. 6/2014. Menurut Borni Kurniawan yang dikutip pada buku Pengembangan Desa, tantangan dalam mewujudkan desa mandiri diantaranya adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pertama, terkait kekhawatiran yang berpangkal pada persoalan Dana Desa yang dikelola desa. meski semua masih berjalan, ada kekhawatiran terjadi penyelewengan anggaran publik yang masif di desa-desa. Akar masalahnya ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelecut motivasi, khususnya bagi Pemerintah Desa dan Pendamping Desa.

²⁵ Borni Kurniawan, *Pengembangan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 11.

- b. Kedua, merubah sikap pasif masyarakat desa dalam urusan pemerintahan ke arah sikap aktif dan kritis. Singkatnya merangsang partisipasi masyarakat desa. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan APBDesa secara keseluruhan hanya akan efektif apabila dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. merekalah yang mesti menjadi evaluator utama untuk menjadi peneyimbang kemungkinan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran publik oleh Pemerintah Desa.
- c. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa, sekaligus menjadi jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa. Tantangan ini khususnya berlaku bagi pendamping desa.
- d. Keempat, perhatian publik atas UU Desa secara umum masih terpaku pada persoalan dana desa. Sementara aspek strategis terkait visi kemandirian desa dan visi desa membangun justru tidak mendapat perhatian yang cukup.

B. Strategi Pengembangan dan Pembangunan Desa

1. Definisi Strategi Pengembangan

Definisi dari strategi adalah ini proses dianalisis kesempatan, melakukan pemilihan target, perumusan dan pelaksanaan rencana dan strategi pengawasan. Disini dikenal sebagai cara yang dilakukan dengan berbagai cara sehingga yang diagendakan sesuatu dapat dicapai secara

efektif dan pada dasarnya efisien.²⁶ Pada dasarnya strategi dilihat dari segi operasional merupakan suatu proses yang telah direncanakan secara matang-matang atau sedemikian untuk meraih sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu berkaitan dengan strategi merupakan alat yang bisa untuk digunakan mengolah dan mengatur penyusunan suatu rencana.

Salah satu yang menjadi indikator, yakni sebagian besar pekerjaan masyarakat di pedesaan adalah seorang petani dan buruh tani. Sektor pertanian seolah menjadi tumpuan hidup masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Namun dengan adanya kemajuan industri, turut pula menurunkan umlah petani dan buruh tani dikarenakan banyak beralih profesi. Disinilah letak permasalahan, dimana potensi desa yang didominasi oleh potensi SDA yang berorientasi pada sektor pertanian seolah keropos dengan adanya kemajuan zaman dan seolah tidak adaktif. Dengan demikian timbulah sebuah wilayah desa tradisional yang masih statis dalam hal pengembangan dan kemajuan sebuah desa. Strategi pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan atau mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberlimpahan SDA tanpa adanya dukungan dari kualitas SDM akan menimbulkan ketimpangan dalam proses proses menemukan kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan.²⁷

Pengembangan desa merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di dalam

²⁶Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: PT. Yayasan Proklamasi CSIS, 2010), hal. 7.

²⁷ Irfan Nursetiawan, *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*, (FISIP Universitas Galuh, 2018), hal. 77.

pengembangan desa diperlukan strategi untuk mencapai cita-cita yang berkemajuan dan tentunya berkelanjutan. Setiap desa tentunya mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berbeda-beda, hal tersebut sejalan dengan topografi dan kontur wilayah sebuah pedesaan itu sendiri. SDA tetap menjadi salah satu penopang utama dalam pengembangan desa.

2. Undang-Undang Pembangunan Desa

Konsep pembangunan atau pembangunan Desa mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.

Partisipasi Masyarakat berfungsi untuk memaparkan penyusunan ini diharapkan tidak hanya sekedar formalitas, namun lebih dari pada itu juga mempertimbangkan substansi kegiatan tersebut karena Musrenbang merupakan ajang dan tempat untuk membahas berbagai macam persoalan terkait dengan pembangunan di daerah. Karenanya, segala yang disepakati pada kegiatan tersebut mestinya dapat direalisasikan sebagai acuan pembangunan daerah ini ke depan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat

berperan untuk memberikan masukan kepada tim penyusun peraturan desa.²⁸

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, masyarakat luas atau para pemangku kepentingan secara mandiri dapat mendiskusikan bersama-sama naskah akademik yang telah disusun tim penyusun perdes. Naskah akademik merupakan kajian teoritis awal yang memuat kenapa peraturan desa tersebut harus dibentuk. Diskusi yang dilaksanakan yaitu berguna untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan melalui seminar naskah akademik tadi, sehingga jika sebuah peraturan desa yang terbentuk juga melalui unsur jejak pendapat masyarakat dalam sebuah desa.²⁹

Bahkan selama peraturan desa belum diterbitkan, dalam tahapan demi tahapan penyusunannya masyarakat harus dilibatkan secara langsung. Dalam penyusunannya pun, dimungkinkan dilakukan perbaikan demi perbaikan naskah akademik tersebut guna mencari hasil yang paling dapat diterima oleh berbagai pihak, Desa, BPD, hingga masyarakatnya.

Pembentukan peraturan desa yang baik dan demokratis dapat terwujud jika didukung oleh penerapan asas-asas pembentukan peraturan desa yang baik dan pemerintahan desa yang baik pula, namun begitu juga sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hokum yang baik sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan ideal, dengan unsur demokratis yang akan tercapai. Dengan demikian terdapat

²⁸ Mohammad Fadli, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Head To A Goog Village Governance*, (Malang: Universitas Brawajaya Press, 2013), hal. 63.

²⁹ *Ibid.*

hubungan timbal balik dari berbagai pihak yang tergabung dalam lapisan pemerintahan desa, termasuk dari unsur lapisan masyarakatnya.

Keberadaan peraturan desa, terbatas mengatur beberapa hal saja, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang sifatnya mengatur
- b. Hal-hal yang sifatnya mengatur
- c. Pembebanan masyarakat/pungutan
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).³⁰

Jika pandangan yang berpusat pada negara memahami demokrasi dari sisi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka pandangan dari masyarakat memahami bahwa pilar utama demokrasi yaitu masyarakat sipil (*civil society*). Dalam sistem demokrasi masyarakat partisipasi masyarakat pada hakekatnya sebagai sarana untuk: pertama, Menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, kedua, Menyalurkan aspirasi warga (rakyat) kepada pemerintah, ketiga, Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik, dan keempat, Menegakkan kedaulatan rakyat. Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang ada.³¹

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam

³⁰ *Ibid.*, hal. 131.

³¹ *Ibid.*, hal. 169.

pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.³²

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.³³

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan seperti dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.³⁴

3. Pembangunan Desa

66. ³² Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat...*, hal.

³³ *Ibid.*, hal. 90.

³⁴ *Ibid.*, hal. 91.

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu maupun komunitas melalui pengembangan, intensifikasi, dan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya. Pembangunan merupakan proses yang kontinu, dan juga harus dipisahkan dari konsep pertumbuhan, dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang secara simultan melibatkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup.³⁵

Untuk lebih mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, di samping melakukan upaya meningkatkan akselerasi pembangunan dari kondisi yang ada (*existing condition*), perlu dirumuskan konsep transformasi pembangunan pedesaan dengan konsep *cut of development*. Transformasi ini akan mengubah pertanian dan pedesaan yang “bersifat tradisional” menjadi pertanian dan pedesaan yang “berbudaya industri”. Berbudaya industri antara lain dicirikan oleh (1) produk yang berstandar dan berkualitas (2) tepat waktu dalam pasokan produk, (3) sedikit ketergantungan dalam lingkungan, (4) sistem permodalan yang kuat, dan (5) sistem manajemen yang akuntabel.³⁶

Agar kegiatan partisipasi masyarakat berjalan dengan efektif dapat dilakukan berbagai cara, adalah:³⁷

- a. Melalui aspek kelembagaan, yaitu bahwa pembangunan desa menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Ini berarti bahwa sebagai pelaksana dalam kegiatan pembangunan adalah pemerintah dan masyarakat

³⁵ M. A. Chozin, *Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal. 55.

³⁶ *Ibid.*, hal. 56.

³⁷ *Ibid.*, hal. 58.

itu sendiri. dalam kegiatan pembangunan, peranan masyarakat itu sendiri sangat besar, tetapi agar perannya efektif maka potensi yang ada perlu ditumbuhkembangkan.

- b. Melalui aspek program yaitu apabila sebuah program pemerintah atau masyarakat tidak diatur dengan baik maka masyarakat menjadi kelebihan beban, apabila program diperbaiki, maka beban masyarakat dapat lebih diringankan, karena terbantu dengan keberadaan program tersebut.

Banyak bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan atau tidak tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sebagai akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bahkan kdangkala terjadi penolakan terhadap usaha pembangunan. Menurut Sudria Munawar hal itu terjadi disebabkan oleh:³⁸

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang tertentu.
- b. Maksud dan tujuan program pembangunan tidak dimengerti oleh masyarakat banyak.
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan masyarakat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat.
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan masyarakat, tetapi sejak awal masyarakat tidak diikuti sertakan.

Dari uraian diatas, maka suatu pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat, harus diciptakan agar pembangunan tersebut menguntungkan

³⁸ Sudria Munawar, *Kepemimpinan...*, hal. 56.

masyarakat, harus dipahami maksudnya oleh masyarakat, dilaksanakan sesuai maksudnya secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dan harus melibatkan masyarakat.

Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya peranserta masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan makin tinggi kesadarannya, serta semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Sudriamunawar menyatakan: bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.³⁹

Secara sederhana, partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat; seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat.⁴⁰

³⁹ Haryono, *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 54.

⁴⁰ *Ibid.*

Partisipasi masyarakat mempunyai arti bahwa masyarakat terlibat secara langsung melalui aktivitas-aktivitas bersama dalam program pembangunan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan.⁴¹

Disisi lain, konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan. Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih efektif, sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam pemecahan masalah.⁴²

Pengembangan Desa pada suatu wilayah merupakan sebuah tanggungjawab bersama yang menjadi hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang tergabung di dalamnya. Karena sebuah pola pembangunan yang solid merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh gotong royong. Dari berbagai uraian diatas maka penting bagi sebuah penduduk pada sebuah wilayah untuk memantapkan sebuah kekompakan dalam pembangunan sebuah daerah atau kawasan agar menjadikan proses pembangunan tersebut mudah dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

⁴¹ Ricky Wirawan dan Ratih Nurpratiwi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4.2 (2015).

⁴² Arthur Lomboh, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe1." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2.6 (2015): 1091.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan sendiri merupakan keadaan sekelompok orang atau manusia dimana dalam kondisi makmur, sehat fisiknya serta damai. Kemudian dalam mencapai keadaan yang seperti itu orang tersebut sangat membutuhkan suatu usaha berdasarkan kekuatan dan kemampuan masing-masing manusia.⁴³ Pengertian ekonomi Islam yang ditulis Yusuf Halim al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikasi yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan dan tata cara membelanjakan harta. Focus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan syariat dalam ebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.⁴⁴

Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian yaitu keberlangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat falah mencakup pengertian keberlangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Hendrie Anto menuliskan di dalam bukunya bahwa menurut Al-Qur'an tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat sedangkan falah di dunia pada hanya merupakan tujuan (yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat). Kata falah

⁴³ Wardoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 45.

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 30.

memiliki banyak makna diantaranya maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik terus menerus dalam keadaan baik menikmati ketentraman, kenyamanan atau kehidupan yang penuh berkah keabadian, kelestarian terus menerus dan keberlanjutan.⁴⁵

Adapun secara umum, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁶

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan bisa diukur dari berbagai aspek kehidupan:

- a. Dengan memandang karakteristik hidup yang berkualitas dari segi materi, seperti bahan pangan, kualitas, tempat tinggal dan sebagainya.
- b. Dengan memandang kondisi dari segi fisik, seperti kondisi lingkungan alam, kesehatan jasmani dan lain-lain.

⁴⁵ Azharia Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hal. 74-75

⁴⁶ Rosin, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Vol. 9 No. 1 Medan 2012, hal. 55.

- c. Dengan memandang dari segi mental seperti lingkungan budaya, fasilitas pendidikan dan lain-lain.
- d. Dengan memandang pada kedudukan social dan integrasi.⁴⁷

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam, siapapun berhak memperolehnya. Sejak Indonesia merdeka salah satu tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁴⁸

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengembangan dan kemandirian desa ini telah banyak dilakukan oleh akademisi. Baik berupa buku, jurnal atau skripsi. Penelitian tersebut adalah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mamduh, dengan judul *Strategi Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDADAN) Ulam Sari dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalikidang Sokaraja Banyumas*. hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi pokdadan Ulam Sari merupakan prioritas yang utama dengan melihat kondisinya yaitu luasnya pemasaran dengan memaksimalkan SDM yang unggul, dengan pemasaran yang luas maka juga akan memengaruhi jaringan yang semakin kuat juga sehingga SDM bisa maksimal guna mengembangkan benih dan pakan ikan mandiri. Dan dilihat dari pandangan islam strategi pemberdayaan pokdadan Ulam Sari sudah sesuai dengan nilai-nilai

⁴⁷ Widyaastuti, Astiana, *Analisis Hubungan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah*, Jurnal Economics Development Analysis Journal Vol 1 No 2 Tahun 2012, hal. 3-4.

⁴⁸ Jahmari Makhruf, *Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Banten: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal. 2.

ekonomi islam yang terutama dalam QS. Al-Anfal ayat 53 yang menyatakan kesejahteraan hanya bisa diwujudkan melalui usaha yang sungguh-sungguh.⁴⁹

Penelitian yang dilaksanakan oleh M Paramita, dengan judul *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal*. hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat meningkat dengan melalui proses sosialisasi serta pelatihan dengan tujuan lebih memanfaatkan sumber daya lokal untuk diolah. Selain itu juga motivasi yang ditumbuhkan, mencatat keuangan, pengolahan produk, dan sampai pada pemasaran produk. kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan dalam berwirausaha serta pengolahan usaha, jadi berbagai produk lokal bisa dimanfaatkan secara baik. Selain itu dengan memanfaatkan produk lokal diharapkan juga bisa menjadi produk yang khas di wilayah tersebut. Sehingga dengan begitu perekonomian masyarakat akan lebih meningkat.⁵⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sarinah, dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi sudah dilakukan yang sesuai dengan 5 indikator program strategi pemberdayaan. Di dalam pemberdayaannya tentunya ada hambatan-hambatan yang dialami. Sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh

⁴⁹ Agil Mamduh, *Strategi Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDADAN) Ulam Sari dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalikidang Sokaraja Banyumas*, (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2017).

⁵⁰ M. Paramita, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal*, dalam Jurnal Vol 4, No 1., (2018).

Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Andeska, dengan judul *Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat home industry budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo secara keseluruhan dari tingkat pendapatan masyarakat sampai tingkat kesehatan sudah dikatakan sejahtera, namun dalam hal ini masih ada beberapa ketimpangan seperti beberapa rumah pelaku home industry yang belum termasuk dalam indikator baik dan kondisi lantai rumah yang masih tanah. Selain itu berdasarkan tinjauan ekonomi Islam bahwa usaha tersebut dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam baik mulai dari bahan baku sampai dengan pemasaran.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Salma, dengan judul *Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karossa Kecamatan Karossa kabupaten Mamuju Tengah*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil pertanian kelapa sawit berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, ada beberapa indikator peranannya. Selain itu keberadaan pertanian kelapa sawit telah memberikan perubahan keadaan terhadap masyarakat dan perubahan pola pikir

⁵¹ Iin Sarinah, Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, dalam *Jurnal Moderat* Vol 5, No 3., (2019).

⁵² Melya Andeska, *Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017).

masyarakat. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang sama-sama menganalisis pengaruh perkembangan usaha. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang, peneliti terdahulu lebih membahas tentang peningkatan ekonomi dan lebih ke perubahan pola pikir masyarakat sedangkan peneliti yang sekarang lebih membahas tentang peningkatan kesejahteraan serta produksi dan distribusi apakah sudah sesuai syariat ekonomi Islam.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Probowari, dengan Judul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen*. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan usaha keramba diminati masyarakat dan menjadi peluang besar. Selain itu juga dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan masyarakat berkembang dengan adanya memanfaatkan skill dan ketrampilan masyarakat yang dulunya petani menjadi pengusaha ikan. Dampak dari adanya keramba ini terdapat beberapa café dan warung pada desa Ngargosari untuk menjual belikan hasil dari panennya.⁵⁴

Tabel 3.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Strategi Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDADAN) Ulam Sari dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalikidang Sokaraja</i>	Persamaan terletak pada kesejahteraan masyarakat	Perbedaan adalah lokasi penelitian, subyek yang diteliti adalah

⁵³ Salma, *Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karossa Kecamatan Karossa kabupaten Mamuju Tengah*, (Makassar : UIN Allaudin, 2016).

⁵⁴ Amalia Prabowari, Skripsi: *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018).

	<i>Banyumas.</i>		kelompok budidaya ikan.
2	<i>Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.</i>	Persaam adalah pada kenomi masyarakat	Perbedaanya adalah pemanfaatan yang terjadi
3	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.</i>	Persamaanya adalah perberdayaan masyarakat	Perbedaanya adalah lokasi penelitian
4	<i>Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam</i>	Persamaan terletak pada kesejahteraan masyarakat	Perbedaanya adalah ekonomi dalam perspektif islam, sedangknpeneliti adalah ekonomi secara umum
5	<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen</i>	Persamaan adalah ekonomi masyarakat	Berbeeda dengan penelitian penelitian ini adalah loasi penelutian
6	<i>Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karossa Kecamatan Karossa kabupaten Mamuju Tengah.</i>	Persamaanya adalah peningkatan ekonomi	Perbedaanya adalah ekonomi dalam perspektif islam, sedangak peneliti adalah ekonomi secara umum

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah menggali informasi terkait dengan pembangunan kemandirian desa yang dilaksanakan dengan pemanfaatan BUMDes, utamanya yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Terkait dengan strategi pemberdayaan ini akan dijadikan acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini.

BUMDes dalam hal ini menerapkan berbagai kegiatan dalam kegiatan pengembangan potensi ekonomi yang dilaksanakan. Bentuk pengembangan tersebut merupakan bentuk inovasi yang dilaksanakan pihak BUMDes dalam mendorong percepatan ekonomi di Desa. Sehingga juga diperlukan adanya komunikasi atau hubungan antara pihak Desa dengan pihak BUMDes dengan mengedepankan kesepahaman program yang dibangun dalam pembangunan.

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian